

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MAKRO KABUPATEN SOPPENG

2018



<https://soppeng.go.id>



<https://soppengkab.bps.go.id>

INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MAKRO KABUPATEN SOPPENG

2018



**INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MAKRO
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018**

ISBN : 978-602-5551-40-6
Katalog : 9201001.7312
No. Publikasi : 73120.1918
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman: ix+ 26
Naskah/Editor : S A Herdiana Putri, S.Stat
Gambar kulit : S A Herdiana Putri, S.Stat
Diterbitkan Oleh: © Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

<https://soppengkab.bps.go.id>



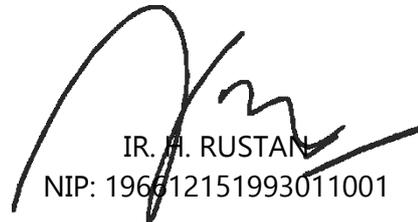
KATA PENGANTAR

"INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MAKRO KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018" diterbitkan pada tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini disusun dalam upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen data. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data primer hasil pengolahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng dan data sekunder dari instansi terkait yang disajikan secara series dari tahun ke tahun, sehingga setiap sektor kegiatan dapat diketahui perkembangannya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kerjasama yang baik secara berkesinambungan dari berbagai sumber data, serta kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan penerbitan publikasi seperti ini di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi konsumen data. Amiin.

Watansoppeng, November 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG



IR. H. RUSTAN
NIP: 196612151993011001

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KATALOG	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Tujuan	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Penjelasan Teknis	6
BAB 2 KONDISI UMUM	7
PEREKONOMIAN KABUPATEN SOPPENG	
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	7
dan Pendapatan Perkapita	
2.2 Sumber Pendapatan	8
BAB 3 PERTANIAN	10
3.1 Sub Sektor Tabama	11
3.2 Sub Sektor	13
Perkebunan	
3.3 Sub Sektor Peternakan	14
3.4 Sub Sektor Kehutanan	14
3.5 Sub Sektor Perikanan	15
BAB 4 INDUSTRI	18
PENGOLAHAN, PERTAMBANGAN, KONSTRUKSI DAN ENERGI	
4.1 Industri Pengolahan	18
4.2 Pertambangan	19
4.3 Listrik dan Air Bersih	19
4.4 Konstruksi	20
BAB 5 SEKTOR TERSIER	22
5.1 Perdagangan Besar	22
dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	

5.2 Transportasi dan Pergudangan	22
5.3 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23
5.4 Informasi dan Komunikasi	23
5.5 Jasa Keuangan dan Asuransi	23
5.6 Real Estate	24
5.7 Jasa Perusahaan	24
5.8 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24
5.9 Jasa Pendidikan	25
5.10 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25
5.11 Jasa Lainnya	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dari waktu ke waktu dimaksudkan untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan tersebut, dalam perkembangannya perlu diamati setiap periode waktu tertentu, agar bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Evaluasi pembangunan juga dilakukan untuk mengukur keberhasilan penerapan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi di seluruh sektor usaha. Kemudian dapat pula dijadikan sebagai faktor koreksi dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi ke depan, sehingga arah sasaran pembangunan yang akan dituju lebih tajam dan berhasil guna.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penerbitan publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara deskriptif mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2015-2018. Kehadiran publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Soppeng secara umum yang telah dicapai dalam empat tahun terakhir.

Penyajian informasi dalam Indikator Ekonomi ini, dibuat dalam bentuk ulasan singkat disertai sajian dalam bentuk tabel yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Data yang dicakup dalam publikasi ini sebagian besar dari hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan langsung. Namun juga terdapat data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait.

Terbitnya publikasi ini, merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data statistik yang berkesinambungan guna menopang kebutuhan data yang semakin beragam dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

1.2 Ruang Lingkup

Wujud nyata dari kemajuan perekonomian suatu daerah, tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Walaupun demikian faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang utama, melainkan masih ada faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Unsur tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh faktor ekonomi merupakan aspek yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk memfokuskan pengamatan mengenai

situasi perekonomian suatu wilayah perlu dilakukan pengkajian (study) secara tersendiri dengan pembahasan secara sistimatis, seperti yang menjadi topik-topik bahasan dalam publikasi ini.

Mengingat aspek perekonomian yang begitu luas, maka hal yang paling mendasar yang sangat membatasi ruang dan ketajaman analisis kita adalah kelengkapan data yang ada. Untuk itu tidak mungkin menyajikan seluruh informasi data statistik ekonomi yang dibutuhkan sebagai indikator yang menggambarkan perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng secara lengkap, melainkan hanya secara garis-garis besarnya saja sesuai dengan data yang tersedia.

Selain itu, pembahasan dalam publikasi ini dibatasi pada level Kabupaten saja, tidak membahas mengenai keadaan wilayah yang lebih kecil seperti mengenai perkembangan perekonomian masing-masing Kecamatan di Kabupaten Soppeng.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan 'Indikator Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2018 (Tahun Terbit 2019)' ini, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai gambaran secara umum perkembangan perekonomian Kabupaten Soppeng dalam periode empat tahun terakhir, 2015-2018, yang dapat digunakan sebagai masukan, dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana kebijakan di bidang perekonomian.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan Indikator Ekonomi Kabupaten Soppeng 2018 ini, hanya merupakan analisis deskriptif, yaitu dengan melihat berbagai kecenderungan data yang ada dari tahun ke tahun yang menggambarkan situasi dan kondisi perekonomian di wilayah Kabupaten Soppeng yang telah terjadi.

Penyusunan Indikator Ekonomi Kabupaten Soppeng 2018 dibagi dalam 5 pokok bahasan yaitu: 1. Pendahuluan; 2. Kondisi umum perekonomian Kabupaten Soppeng; 3. Pertanian; 4. Industri pengolahan, pertambangan/penggalian, listrik/air bersih, dan konstruksi; dan 5. Sektor tersier yang meliputi perdagangan, angkutan, keuangan, dan jasa-jasa.

1.5 Sumber Data

Sumber data utama Indikator Ekonomi Kabupaten Soppeng 2018 adalah data primer yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh BPS Kabupaten Soppeng dan data sekunder berupa hasil publikasi BPS dan hasil pengumpulan dari berbagai instansi. Terkait dengan hal tersebut terdapat perbedaan dari pada publikasi yang berhubungan dengan PDRB

dibandingkan publikasi tahun sebelumnya. Publikasi tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, tapi publikasi sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010, sehingga nilai tambah masing-masing komponen berubah karena adanya perubahan konsep penghitungan yang mengakibatkan pertumbuhan maupun distribusi mengalami perubahan.

Perubahan yang lain yaitu pada penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2000 hanya mengelompokkan sembilan sektor lapangan usaha, sedangkan penghitungan PDRB tahun dasar 2010 mengelompokkan 17 lapangan usaha (kategori). Pengembangan jumlah lapangan usaha merujuk pada SNA 2008 sebagai akibat dari banyaknya perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

1.6 Penjelasan Teknis

Produk Domestik Regional Bruto

Untuk keperluan perencanaan, evaluasi dan penentuan kebijakan pembangunan suatu daerah, dibutuhkan data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data ini akan banyak membantu berbagai pihak terutama Bappeda Kabupaten Soppeng dan instansi lainnya, perbankan maupun kalangan swasta untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Nilai tambah bruto adalah tambahan nilai yang ditimbulkan oleh aktifitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan baku dan penolong sehingga lebih dekat kepada pengguna atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor produksi. Apabila seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dijumlahkan maka akan diperoleh nilai PDRB.

PDRB dapat disajikan dari tiga segi dinilai dari cara penyusunan:

- a. Dari Segi Produksi
PDRB adalah jumlah nilai netto produksi barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Dari Segi Pendapatan
PDRB adalah jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah tertentu pada jangka waktu tertentu (umumnya satu tahun).
- c. Dari Segi Pengeluaran
PDRB adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap perubahan stok, dan ekspor netto di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB juga terbagi atas dua dilihat dari segi harga barang yang digunakan, yaitu:

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah: Jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah: Jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang "tetap" pada tahun dasar. Dalam publikasi ini harga pasar yang tetap itu adalah harga-harga pada keadaan tahun 2010.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Ukuran Kemiskinan

Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* -P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* -P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB 2

KONDISI UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN SOPPENG

Kondisi perekonomian suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah itu untuk mengembangkan segala potensi yang ada di daerahnya. Dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki, berbagai kebijaksanaan, langkah dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Soppeng dengan tujuan meningkatkan laju pembangunan perekonomian. Kebijakan dan upaya pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari berbagai sisi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita. Selain itu, dapat dilihat lebih detail sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap total pendapatan Daerah (PDRB).

2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2018 sebesar 8,15 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dengan pertumbuhan sebesar 8,29 persen. Namun PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu Rp 44,10 juta dibandingkan pada tahun 2017 PDRB Perkapita Kabupaten Soppeng sebesar Rp. Rp 39,19 juta.

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2015 – 2018

<i>Tahun</i>	<i>PDRB ADHB (Juta Rp)</i>	<i>PDRB Perkapita (Juta Rp)</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	6.843.608,20	30,27	5,11
2016	7.895.939,50	34,89	8,11
2017*)	8.876.207,00	39,19	8,29
2018**)	10.001.456,00	44,10	8,15

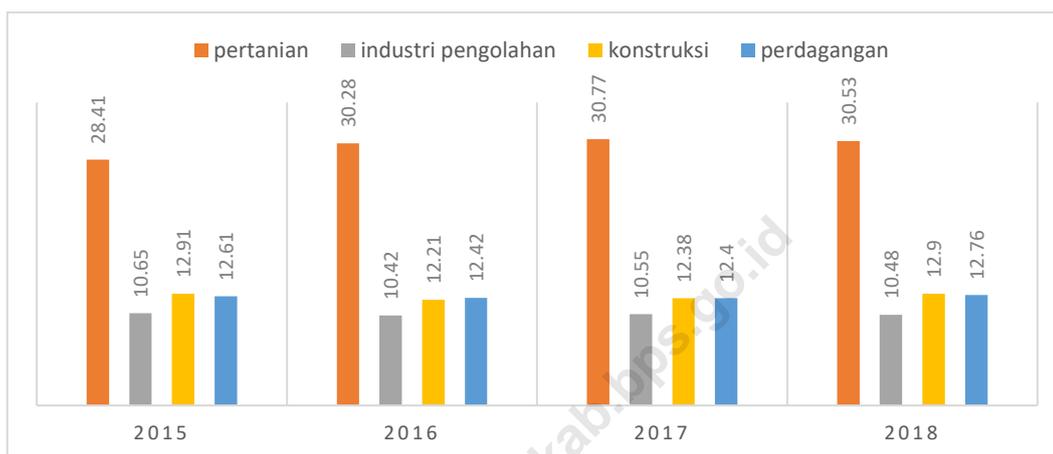
Catatan : *) Angka sementara

***) Angka sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

2.2 Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan masyarakat atau sumber mata pencaharian penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi di Kabupaten Soppeng sangat tergantung pada Sektor Pertanian, Perdagangan, Konstruksi dan Industri pengolahan. Hal itu, seperti digambarkan oleh peranan masing-masing sektor kegiatan ekonomi dalam menciptakan total PDRB di Kabupaten Soppeng. Lihat Grafik 2.1



Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

Grafik 2.1 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB 3 PERTANIAN

Denyut nadi perekonomian Kabupaten Soppeng mempunyai ketergantungan yang besar pada Sektor Pertanian, yaitu sebesar 30,53 persen di samping sektor-sektor perekonomian lainnya. Ketergantungan pada Sektor Pertanian sebesar itu digambarkan oleh kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2018.

Hal ini berarti bahwa jika sektor ini produktifitasnya baik maka kontribusinya akan memberi dampak positif terhadap kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Demikian juga sebaliknya jika Sektor Pertanian produktifitasnya menurun, maka akan berdampak besar terhadap kemerosotan perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng.

Lapangan usaha pertanian terbagi menjadi tiga bagian sub yaitu;

- (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi;
 - a) tanaman pangan;
 - b) tanaman hortikultura semusim;
 - c) perkebunan semusim;
 - d) tanaman hortikultura tahunan dan lainnya;
 - e) perkebunan tahunan;
 - f) peternakan;
 - g) jasa pertanian dan perburuan;
- (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu
- (3) Perikanan.

Tabel 3.1 Kontribusi Nilai Tambah Bruto Lapangan Usaha Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Soppeng seri 2010 Tahun 2015-2018 (%)

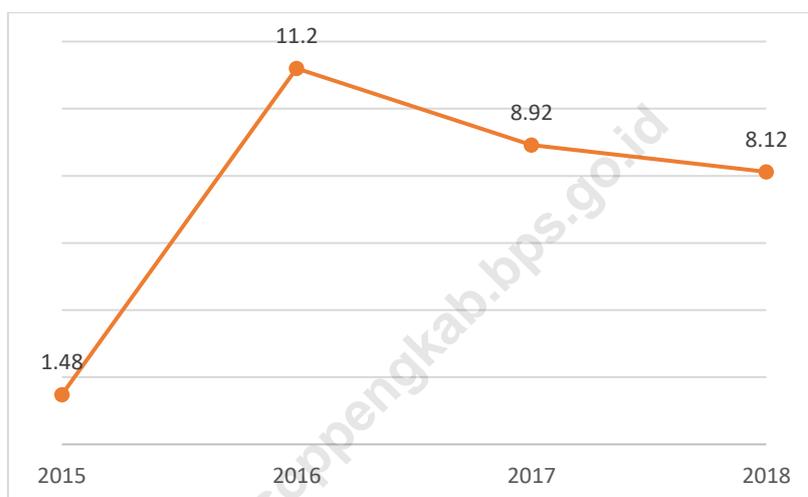
Lapangan Usaha	2015	2016	2017*)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,41	30,28	30,77	30,53
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	25,92	27,58	27,88	27,55
a. Tanaman Pangan	14,88	16,82	17,02	16,94
b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,34	0,33	0,31	0,29
c. Perkebunan Semusim	0,49	0,47	0,44	0,42
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,35	0,34	0,34	0,31
e. Perkebunan Tahunan	7,91	7,74	7,90	7,72
f. Peternakan	1,41	1,35	1,33	1,33
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,54	0,53	0,53	0,53
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,06	0,06	0,05	0,05
3. Perikanan	2,42	2,64	2,84	2,93

Catatan : *) Angka sementara

***) Angka sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

Diantara ketiga sub Lapangan Usaha di atas (Tabel 3.1), sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017.



Grafik 3.1 Pertumbuhan lapangan usaha Pertanian di Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan seri 2010 Tahun 2015-2018

3.1 Sub Sektor Tabama

Kontribusi Lapangan usaha Tanaman Pangan terhadap PDRB Kabupaten Soppeng setiap tahun relatif tinggi seperti pada tahun 2018 yang mencapai 16,94 persen, terutama didukung oleh jenis tanaman padi sawah disamping jenis tanaman palawija.

Kegiatan di sektor pertanian seperti tanaman padi di Kabupaten Soppeng merupakan sumber penghasilan utama masyarakat disamping kegiatan usaha ekonomi lainnya karena didukung oleh luas lahan yang sangat luas dan berpotensi untuk terus ditingkatkan produksinya.

Pada tahun 2018 produksi padi sebanyak 338.933 ton, meningkat dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 309.816 ton, hal ini tidak cukup mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

Produksi jagung sebesar 41.127 ton pada tahun 2015 meningkat pada tahun 2016 menjadi 93.131 ton, kemudian turun pada tahun 2017 menjadi 84.759 ton dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 94.837 ton.

Produksi Ubi Kayu pada tahun 2015 sebanyak 231 ton naik menjadi 287 ton pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 465 ton pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 230 ton pada tahun 2018. Sedangkan Produksi Ubi Jalar pada tahun 2015 sebanyak 123 ton turun menjadi 73 ton pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 123 ton pada tahun 2017, lalu naik lagi menjadi 156 ton pada tahun 2018.

Kemudian kacang-kacangan yang dicakup meliputi, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Produksi kacang tanah tahun 2015 sebanyak 406 ton, kemudian produksinya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 900 ton, 145 ton, dan 1425 ton.

Pada tahun 2015 produksi kacang kedelai sebanyak 4.947 ton, produksi tahun berikutnya yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 2.497 ton, 1.319 ton, dan 523 ton. Untuk komoditi kacang hijau, produksinya tahun 2015 sebanyak 329 ton, dan produksi tahun berikutnya yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing produksinya sebanyak 100 ton, 54 ton dan 257 ton.

Tabel 3.2 Produksi Tabama Menurut Jenisnya di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018 (Ton)

Jenis Tabama	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Padi	226.433	280.905	309.816	338.933
b. Jagung	41.127	93.131	84.759	94.837
c. Ubi Kayu	231	287	465	230
d. Ubi Jalar	123	73	123	156
e. Kacang Tanah	406	900	145	1.425
f. Kacang Kedelai	4.947	2.497	1.319	523
g. Kacang Hijau	329	100	54	257

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng

Fluktuasi produksi untuk jenis tanaman palawija sebenarnya tidak terlalu terpengaruh terhadap pasang surutnya produksi tanaman pangan secara keseluruhan. Perubahan produksi yang begitu mencolok sangat mudah terjadi, mengingat banyaknya faktor yang bisa berpengaruh, seperti faktor iklim, distribusi penanaman oleh petani, hama dan penyakit tanaman ataupun faktor pasar/harga.

Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di Kabupaten Soppeng, menjadikan penyerapan tenaga kerja tertinggi juga terjadi di sector pertanian. Berdasarkan data tenaga kerja, tercatat 44,99 % tenaga kerja berada di

sektor pertanian pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian sejalan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

3.2 Sub Sektor Perkebunan

Secara keseluruhan produksi perkebunan di Kabupaten Soppeng dalam periode 2015-2018 tampak dari tahun ke tahun berfluktuasi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018 (Ton)

Jenis Tanaman Perkebunan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelapa	3.647	2.933	2.387	2.146
Kopi	82	66	65	65
Cengkeh	46	0	0	25
Aren	164	154	154	138
Lada	4	3	4	4
Coklat	12.345	12.361	10.016	7.869
Kemiri	1.242	1.242	679	1.015
Jambu Mete	1.048	221	569	569

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng

Dalam ulasan tentang lapangan usaha perkebunan hanya fokus pada beberapa jenis tanaman yang menjadi tanaman prioritas di Kabupaten Soppeng, seperti kelapa, coklat, kemiri, dan jambu mete. Pada Tabel 3.3 terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng, tetapi sebagian besar jenis tanaman perkebunan tersebut produksinya belum bisa menjadi andalan seperti pada jenis tanaman perkebunan yang telah disebutkan satu persatu di atas.

Produksi kelapa dalam dari tahun ketahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 3.647 ton turun pada tahun 2016 menjadi 2.933 ton, pada tahun 2017 turun menjadi 2.387 ton dan turun lagi pada tahun 2018 menjadi 2.146 ton.

Pada tahun 2015 produksi coklat sebanyak 12.345 ton, naik pada tahun 2016 menjadi 12.361 ton lalu turun pada tahun 2017 menjadi 10.016 ton, dan turun lagi menjadi 7.869 ton pada tahun 2018. Produksi kemiri pada tahun 2015 sebanyak 1.242 ton, pada tahun 2016 produksinya tetap, pada tahun 2017 produksinya turun signifikan menjadi 679 ton, lalu naik lagi menjadi 1.015 ton pada tahun 2018. Untuk produksi Jambu Mete pada tahun 2015 sebanyak 1.048 ton, pada tahun 2016 turun

sangat drastis menjadi 221 ton, lalu naik pada tahun 2017 menjadi 569 ton, dan pada tahun 2018 produksinya tetap 569 ton.

3.3 Sub Sektor Peternakan

Secara umum kegiatan peternakan di Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun tampak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah populasi dari berbagai jenis ternak yang diusahakan masyarakat.

Populasi ternak sapi pada tahun 2015 sebanyak 40.338 ekor dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 40.739 ekor, pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 49.120 ekor dan pada tahun 2018 naik mencapai 52.027 ekor.

Populasi ternak kerbau pada tahun 2015 sebesar 91 ekor, pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing 91 ekor, 69 ekor, dan 73 ekor.

Populasi Kuda pada tahun 2015 sebanyak 35.368 ekor, kemudian tahun 2016 turun menjadi 33.216 ekor, dan pada tahun 2017 turun sangat drastis menjadi 4.019 ekor, lalu turun lagi menjadi 3.209 ekor pada tahun 2018.

Populasi Ayam Buras pada tahun 2015 sebanyak 980.582 ekor, menurun pada tahun 2016 menjadi 977.907 ekor dan pada tahun 2017 naik menjadi 1.385.461 ekor, lalu naik lagi menjadi 2.745.488 ekor pada tahun 2018. Selain itu, populasi ayam petelur pada tahun 2015 sebanyak 439.851 ekor, pada tahun 2016 meningkat menjadi 584.892 ekor, pada tahun 2017 turun menjadi 560.959 ekor, lalu naik lagi menjadi 597.112 ekor pada tahun 2018.

Populasi ayam ras pedaging pada tahun 2015 sebanyak 63.298 ekor, pada tahun 2016 naik menjadi 70.281 ekor, pada tahun 2017 naik lagi menjadi 79.342 ekor, dan naik secara drastis menjadi 288.000 pada tahun 2018.

Tabel 3.4 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018 (Ekor)

Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sapi	40.338	40.739	49.120	52.027
Kerbau	91	91	69	73
Kuda	35.368	33.216	4.019	3.209
Kambing	21.830	21.100	27.870	30.942
Ayam Buras	980.582	977.907	1.385.461	2.745.488
Ayam Ras Petelur	439.851	584.892	560.959	597.112
Ayam Ras Pedaging	63.298	70.281	79.342	288.000
Itik	87.384	124.720	133.244	177.215

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng

Populasi itik pada tahun 2015 sebanyak 87.384 ekor, pada tahun 2016 naik menjadi 124.720 ekor, pada tahun 2017 naik menjadi 133.244 ekor, dan naik lagi menjadi 177.215 ekor pada tahun 2018.

3.4 Sub Sektor Kehutanan

Sub sektor kehutanan di Kabupaten Soppeng kurang berpotensi sesuai kondisi wilayah, karena luas lahan di Kabupaten Soppeng lebih banyak dimanfaatkan untuk lahan persawahan dan perkebunan. Hal ini juga terlihat dalam kontribusi sub sektor Kehutanan terhadap PDRB hanya sebesar 0,05 persen.

Secara geografis, Kabupaten Soppeng memiliki lahan-lahan kering yang luas, begitupula dengan hutan Lindungnya. Hutan lindung di Kabupaten Soppeng seluas 19.602 Ha.

3.5 Sub Sektor Perikanan

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Soppeng dalam periode 2015-2018 produksinya dari tahun ke tahun berfluktuasi. Produksi Perikanan air sungai pada tahun 2015 sebanyak 559 ton, pada tahun 2016 naik menjadi 593 ton, pada tahun 2017 menurun menjadi 427 ton, lalu turun menjadi 271 ton pada tahun 2018. Sedangkan produksi perikanan dengan budidaya di kolam pada tahun 2015 sebanyak 153 ton kemudian produksinya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 275 ton, 196 ton, dan 251 ton.

Selanjutnya budidaya ikan di rawa pada tahun 2015 sebanyak 52 ton kemudian produksinya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 324 ton, 242 ton, dan 53 ton. Produksi ikan di sawah pada tahun 2015 sebanyak 15 ton, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 22 ton, di tahun 2017 naik signifikan menjadi 122 ton, lalu turun lagi menjadi 114 ton pada tahun 2018.

Produksi perikanan di danau tahun 2015 sebanyak 833 ton, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 3.473 ton, pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.394 ton, lalu turun menjadi 1.912 ton pada tahun 2018.

Tabel 3.5 Produksi Perikanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018 (Ton)

Jenis Produksi	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Danau	833	3.473	4.394	1.912
Sungai	559	593	427	271
Rawa	52	324	242	53
Kolam	153	275	196	251
Sawah	15	22	122	114

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB 4

INDUSTRI PENGOLAHAN, PERTAMBANGAN, KONSTRUKSI DAN ENERGI

4.1 Industri Pengolahan

Usaha di Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng umumnya berbasis pada industri kecil dan industri rumah tangga. Selain industri kecil, juga terdapat industri pengolahan yang tergolong besar/ sedang, namun jumlahnya masih sangat terbatas.

Pada tahun 2018, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terhadap total PDRB di Kabupaten Soppeng sebesar 10,48 persen di mana menjadi salah satu penyumbang perekonomian terbesar.

Tabel 4.1 Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

Sektor Industri Pengolahan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	10,65	10,39	10,47	10,48
Pertumbuhan (%)	6,54	6,68	10,15	5,7

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng

Perkembangan industri pengolahan dalam empat tahun berfluktuasi pada periode tahun 2015-2018. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan dalam empat tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,54 persen, kemudian pada tahun 2016 menjadi 6,68 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 10,15 persen, lalu pada tahun 2018 turun menjadi 5,7 persen. Peningkatan di Sektor Industri Pengolahan, meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, penerimaan pendapatan (output), maupun besarnya investasi.

Tabel 4.2 Perkembangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

Indikator Industri Pengolahan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha Industri	3.678	3.689	3.701	3.713
Tenaga Kerja	13.276	13.323	13.333	13.349
Investasi (Ribu Rp)	45.429.706	50.992.647	53.444.011	63.840.769

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng

Pada tahun 2015 usaha industri pengolahan sebanyak 3.678 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 13.276 orang, lalu menjadi 3.689 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 13.323 orang pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 unit usaha sebanyak 3.701 dengan tenaga kerja 13.333 orang dan pada tahun 2018 unit usaha sebanyak 3.713 dengan tenaga kerja 13.349 orang.

Pola peningkatan penyerapan tenaga kerja mengikuti pola peningkatan usaha industri. Apabila usaha Industri meningkat pada tahun tersebut, maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat, begitupun nilai investasi dan outputnya.

4.2 Pertambangan

Sektor Pertambangan yang dikelola di Kabupaten Soppeng, hanyalah merupakan usaha penggalian yang dikenal usaha pertambangan golongan C. Kegiatannya melakukan penggalian pasir, tanah, batu, termasuk pasir bercampur kerikil (Sirtu) yang biasa digunakan untuk pembangunan, terutama dalam pembangunan jalan raya.

Tabel 4.3 Perkembangan Kategori Pertambangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

Indikator Kategori Penggalian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	4,19	4,5	4,29	4,33
Pertumbuhan (%)	4,78	10,84	7,69	9,58

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng

Kegiatan usaha pertambangan dan penggalian di Kabupaten Soppeng setiap tahun memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng 4,33 persen pada tahun 2018, dengan laju pertumbuhan sebesar 9,58 persen.

4.3 Listrik dan Air Bersih

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat dan juga merupakan salah satu sarana produksi, sehingga jika listrik padam maka berbagai aktifitas terhambat karena berbagai macam kegiatan sosial ekonomi banyak bergantung pada listrik. Penyediaan energi listrik di Kabupaten Soppeng terus meningkat. Hal ini terlihat dengan semakin besarnya kapasitas daya listrik yang terpasang seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan listrik.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Soppeng terdapat 56.101 pelanggan listrik PLN, pada tahun 2016 tetap 56.101, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 29.253 pelanggan, lalu meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 62.487 pelanggan.

Tabel 4.4 Banyaknya Pelanggan, KVA Terpasang dan KWH Terjual di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

Indikator Kategori Listrik	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelanggan	56.101	56.101	29.253	62.487
KVA Tersambung (000)	53.504	53.504	34.456	64.513
KWH Terjual (000)	71.848	71.848	48.289	38.649

Sumber: PLN ULP Soppeng dan Pajalesang

Sementara itu, kapasitas listrik yang tersambung pada tahun 2015 sebesar 53.504 ribu KVA, pada tahun 2016 tetap 53.504 ribu, kemudian turun menjadi 34.456 ribu KVA pada tahun 2017, lalu naik menjadi 64.513 ribu KVA pada tahun 2018. Sedangkan energi listrik yang terjual pada tahun pada tahun 2015 sebanyak 71.848 ribu KWH, tetap 71.848 ribu KWH pada tahun 2016, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 48.289 ribu KWH, lalu turun lagi menjadi 38.649 ribu KWH pada tahun 2018.

Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penyediaan air bersih yang memadai sangatlah penting untuk membangun kehidupan yang sehat. Sektor air bersih, secara rata-rata mempunyai kontribusi terhadap PDRB sekitar 0,05 persen periode tahun 2015-2018. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan maka jumlah pemakaian air juga akan meningkat, begitu juga nilai pemakaian otomatis meningkat. Adapun nilai pemakaian yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.016 meter kubik, pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.045 meter kubik, pada tahun 2017 dan 2018 data tidak tersedia.

Tabel 4.5 Perkembangan Sektor Air Bersih di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

Indikator Kategori Air Bersih	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelanggan	7.315	7.349	8.461	...
Pemakaian (Ribu m3)	1.016	1.045
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	0,05	0,04	0,05	0,05
Pertumbuhan (%)	0,52	2,46	7,49	9,48

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

4.4 Konstruksi

Sektor Konstruksi (Bangunan) mempunyai kontribusi terhadap PDRB sekitar 12,91 persen di tahun 2015, selanjutnya 12,14 persen di tahun 2016, lalu 12,59 persen di tahun 2017, dan 12,9 persen di tahun 2018. Kontribusi yang cukup besar ini menjadikan sektor konstruksi menjadi sektor penyumbang perekonomian Soppeng terbesar ketiga.

Tabel 4.6 Perkembangan Sektor Konstruksi di Kabupaten Soppeng Tahun 2015-2018

Indikator Kategori Konstruksi	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kontribusi Terhadap PDRB (%)	12,91	12,14	12,59	12,9
Pertumbuhan (%)	5,65	4,28	8,36	8,94

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng

Sektor konstruksi dilihat dari pertumbuhannya dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2017 dimana pertumbuhannya cukup signifikan. Pada tahun 2015 sebesar 5,65 persen, pada tahun 2016 melambat menjadi 4,28 persen, kemudian pada tahun 2017 pertumbuhannya sebesar 8,36 persen, lalu naik lagi menjadi 8,94 persen pada tahun 2018.

BAB 5

SEKTOR TERSIER

Kelompok sektor ini mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian suatu wilayah. Biasanya bagi negara-negara yang sudah maju, kontribusi yang disumbangkan dari kelompok sektor ini terhadap pendapatan suatu wilayah melebihi besarnya dari kontribusi sektor pertanian.

5.1 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sub lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub lapangan usaha ini.

Pada tahun 2018, kategori perdagangan di Kabupaten Soppeng merupakan kategori terbesar ketiga yaitu 12,76 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) sebesar Rp 1.276 milyar.

5.2 Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain- lain.

Pada tahun 2018, kategori transportasi dan pergudangan mempunyai NTB sebesar Rp 303 milyar dengan kontribusi 3,03 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng.

5.3 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan komodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Pada tahun 2018 penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,47 persen dengan NTB sebesar Rp. 147 milyar.

5.4 Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Lapangan usaha terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Pada tahun 2018 informasi dan komunikasi memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 2,99 persen dengan NTB sebesar Rp 299 milyar.

5.5 Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Pada tahun 2018 jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 3,24 persen dengan NTB sebesar Rp 324 milyar.

5.6 Real Estate

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real estate lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah property berupa tanah dan bangunan.

Pada tahun 2018 Real estate memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 5,27 persen dengan NTB sebesar Rp 527 milyar.

5.7 Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) lapangan usaha, yakni lapangan usaha M dan lapangan usaha N. Lapangan usaha M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk lapangan usaha M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Lapangan usaha N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk lapangan usaha N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Pada tahun 2018 jasa perusahaan memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 0,20 persen dengan NTB sebesar Rp 19,75 milyar.

5.8 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Lapangan usaha ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan

imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di lapangan usaha lain dalam KBLI tidak termasuk pada lapangan usaha ini., meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada lapangan usaha ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk lapangan usaha pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada lapangan usaha Q.

Pada tahun 2018 kategori ini memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 6,07 persen dengan NTB sebesar Rp 607 milyar.

5.9 Jasa Pendidikan

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Lapangan usaha ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Pada tahun 2018 jasa pendidikan memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 4,18 persen dengan NTB sebesar Rp 418 milyar.

5.10 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Pada tahun 2018 jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,68 persen dengan NTB sebesar Rp 168 milyar.

5.11 Jasa Lainnya

Lapangan usaha Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 lapangan usaha pada KBLI 2009. Lapangan usaha ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Pada tahun 2018 jasa lainnya memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 0,74 persen dengan NTB sebesar Rp 74 milyar.

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<https://soppengkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-5551-40-6



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo, Watansoppeng. Telp (0484) 21060, Fax (0484) 23377

Homepage: <http://soppengkab.bps.go.id> Email: soppengkab@bps.go.id